



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEREKONOMIAN NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN DAFTAR
PROYEK STRATEGIS NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi atas usulan Proyek Strategis Nasional serta untuk mengakomodasi perkembangan dan kepastian hukum dalam mendukung kelancaran pelaksanaan Proyek Strategis Nasional maka diperlukan perubahan daftar Proyek Strategis Nasional sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional dan ketentuan Pasal 2 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6654);
4. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 164) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 363);
5. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
6. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 64);
7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1034) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1260);
8. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1223);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL.

Pasal I

Daftar Proyek Strategis Nasional dalam Lampiran Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1034) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1260) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

Pasal II

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Agustus 2023

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Agustus 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 675

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



I Ketut Hadi Priatna
NIP. 197405071999031002

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG
 PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 7 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
 MENTERI KOORDINATOR BIDANG
 PEREKONOMIAN NOMOR 7 TAHUN 2021
 TENTANG PERUBAHAN DAFTAR PROYEK
 STRATEGIS NASIONAL

PERUBAHAN DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL

I. PROYEK

| NO. | DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL | LOKASI |
|-------------------------------------|---|---|
| A. Sektor Jalan dan Jembatan | | |
| 1. | Jalan Tol Serang - Panimbang | Provinsi Banten |
| 2. | Jalan Tol Pandaan - Malang | Provinsi Jawa Timur |
| 3. | Jalan Tol Manado - Bitung | Provinsi Sulawesi Utara |
| 4. | Jalan Tol Balikpapan - Samarinda | Provinsi Kalimantan Timur |
| 5. | Jalan Tol Medan - Binjai - bagian dari Trans Sumatera | Provinsi Sumatera Utara |
| 6. | Jalan Tol Pekanbaru - Kandis - Dumai - bagian dari Trans Sumatera | Provinsi Riau |
| 7. | Jalan Tol Kisaran - Tebing Tinggi - bagian dari Trans Sumatera | Provinsi Sumatera Utara |
| 8. | Jalan Tol Sigli - Banda Aceh - bagian dari Trans Sumatera | Provinsi Aceh |
| 9. | Jalan Tol Binjai - Langsa - bagian dari Trans Sumatera | Provinsi Aceh dan Sumatera Utara |
| 10. | Jalan Tol Bukittinggi - Padang Panjang - Lubuk Alung - Padang - bagian dari Trans Sumatera | Provinsi Sumatera Barat |
| 11. | Jalan Tol Rantau Prapat - Kisaran - bagian dari Trans Sumatera | Provinsi Sumatera Utara |
| 12. | Jalan Tol Langsa - Lhokseumawe - bagian dari Trans Sumatera | Provinsi Aceh |
| 13. | Jalan Tol Lhokseumawe - Sigli - bagian dari Trans Sumatera | Provinsi Aceh |
| 14. | Jalan Tol Pekanbaru - Bangkinang - Payakumbuh - Bukittinggi - bagian dari Trans Sumatera | Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Riau |
| 15. | Jalan Tol Tebing Tinggi - Pematang Siantar - Prapat - Tarutung - Sibolga - bagian dari Trans Sumatera | Provinsi Sumatera Utara |

| NO. | DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL | LOKASI |
|-----|--|--|
| 16. | Jalan Tol Betung (Sp. Sekayu) - Tempino - Jambi - bagian dari Trans Sumatera | Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan |
| 17. | Jalan Tol Jambi - Rengat - bagian dari Trans Sumatera | Provinsi Jambi dan Riau |
| 18. | Jalan Tol Rengat - Pekanbaru - bagian dari Trans Sumatera | Provinsi Riau |
| 19. | Jalan Tol Dumai - Sp. Sigambal - Rantau Prapat - bagian dari Trans Sumatera | Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Utara |
| 20. | Jalan Tol Simpang Indralaya - Muara Enim - bagian dari Trans Sumatera | Provinsi Sumatera Selatan |
| 21. | Jalan Tol Muara Enim - Lahat - Lubuk Linggau - bagian dari Trans Sumatera | Provinsi Sumatera Selatan |
| 22. | Jalan Tol Lubuk Linggau - Curup - Bengkulu - bagian dari Trans Sumatera | Provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu |
| 23. | Jalan Tol Kayu Agung - Palembang - Betung | Provinsi Sumatera Selatan |
| 24. | Jalan Tol Cileunyi - Sumedang - Dawuan | Provinsi Jawa Barat |
| 25. | Jalan Tol Ciawi - Sukabumi - Ciranjang - Padalarang | Provinsi Jawa Barat |
| 26. | Jalan Tol Cengkareng - Batu Ceper - Kunciran | Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta dan Provinsi Banten |
| 27. | Jalan Tol Serpong - Cinere | Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat |
| 28. | Jalan Tol Cinere - Jagorawi | Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat |
| 29. | Jalan Tol Cimanggis - Cibitung | Provinsi Jawa Barat |
| 30. | Jalan Tol Cibitung - Cilincing | Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat |
| 31. | Jalan Tol Bekasi - Cawang - Kampung Melayu | Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat |
| 32. | Jalan Tol Serpong - Balaraja | Provinsi Banten |
| 33. | Jalan Tol Semanan - Sunter - bagian dari 6 ruas tol DKI Jakarta | Provinsi DKI Jakarta |
| 34. | Jalan Tol Sunter - Pulo Gebang - bagian dari 6 ruas tol DKI Jakarta | Provinsi DKI Jakarta |
| 35. | Jalan Tol Duri Pulo - Kampung Melayu - bagian dari 6 ruas tol DKI Jakarta | Provinsi DKI Jakarta |
| 36. | Jalan Tol Kemayoran - Kampung Melayu - bagian dari 6 ruas tol DKI Jakarta | Provinsi DKI Jakarta |
| 37. | Jalan Tol Ulujami - Tanah Abang - bagian dari 6 ruas tol DKI Jakarta | Provinsi DKI Jakarta |

| NO. | DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL | LOKASI |
|----------------------------|---|---|
| 38. | Jalan Tol Pasar Minggu - Casablanca - bagian dari 6 ruas tol DKI Jakarta | Provinsi DKI Jakarta |
| 39. | Jalan Tol Pasuruan - Probolinggo | Provinsi Jawa Timur |
| 40. | Jalan Tol Probolinggo - Banyuwangi (Target Penyelesaian Tahun 2024 Ruas Jalan Tol Probolinggo - Besuki) | Provinsi Jawa Timur |
| 41. | Jalan Tol Krian - Legundi - Bunder - Manyar | Provinsi Jawa Timur |
| 42. | Jalan Tol Jakarta - Cikampek II Sisi Selatan | Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat |
| 43. | Jalan Tol Semarang - Demak | Provinsi Jawa Tengah |
| 44. | Jalan Tol Yogyakarta - Bawen | Provinsi Daerah Istimewa (D.I.) Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah |
| 45. | Pembangunan <i>Fly Over</i> dari dan Menuju Terminal Teluk Lamong | Provinsi Jawa Timur |
| 46. | Jalan Tol Ngawi - Kertosono - Kediri | Provinsi Jawa Timur |
| 47. | Jalan Tol Depok - Antasari (termasuk Bojonggede - Salabenda) | Provinsi Jawa Barat |
| 48. | Jalan Tol Solo - Yogyakarta - Kulon Progo | Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi D.I. Yogyakarta |
| 49. | Jalan Tol Bogor <i>Ring Road</i> (termasuk Caringin - Salabenda) | Provinsi Jawa Barat |
| 50. | Jalan Tol Gedebage - Tasikmalaya - Cilacap (Target Penyelesaian Tahun 2024 Ruas Jalan Tol Gedebage - Tasikmalaya) | Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Tengah |
| 51. | Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban | Provinsi Jawa Barat |
| 52. | Pembangunan Jalan Tol Gilimanuk - Negara - Pekutatan - Soka - Mengwi | Provinsi Bali |
| 53. | Pembangunan Akses Pelabuhan Tanjung Priok Timur Baru/ <i>New Priok Eastern Access</i> (NPEA) | Provinsi DKI Jakarta |
| B. Sektor Pelabuhan | | |
| 54. | Pelabuhan KEK Maloy | Provinsi Kalimantan Timur |
| 55. | Pelabuhan Sanur - Nusa Ceningan/Lembongan | Provinsi Bali |
| 56. | Pelabuhan Likupang | Provinsi Sulawesi Utara |
| 57. | Makassar <i>New Port</i> | Provinsi Sulawesi Selatan |
| 58. | Terminal <i>Multipurpose</i> Labuan Bajo | Provinsi Nusa Tenggara Timur |

| NO. | DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL | LOKASI |
|------------------------|--|------------------------------|
| 59. | Pembangunan Pelabuhan Patimban | Provinsi Jawa Barat |
| 60. | Pengembangan Pelabuhan Terminal Kijing | Provinsi Kalimantan Barat |
| 61. | Pengembangan Pelabuhan Kupang | Provinsi Nusa Tenggara Timur |
| 62. | Pengembangan Pelabuhan Sorong | Provinsi Papua Barat |
| 63. | Pengembangan Pelabuhan Teluk Palu | Provinsi Sulawesi Tengah |
| 64. | Pengembangan Pelabuhan <i>Hub</i> Internasional Kuala Tanjung | Provinsi Sumatera Utara |
| 65. | Pengembangan Pelabuhan <i>Hub</i> Internasional Bitung | Provinsi Sulawesi Utara |
| 66. | Pengembangan Pelabuhan Benoa (<i>Bali Maritime Tourism Hub</i>) | Provinsi Bali |
| 67. | Pembangunan Pelabuhan Ambon Baru/ <i>New Ambon</i> | Provinsi Maluku |
| 68. | Pembangunan Pelabuhan Palembang Baru/ <i>New Palembang</i> | Provinsi Sumatera Selatan |
| 69. | Pembangunan Pelabuhan Terminal Peti Kemas Muaro Jambi | Provinsi Jambi |
| C. Sektor Bandar Udara | | |
| 70. | Bandar Udara Baru Yogyakarta - Kulon Progo | Provinsi D.I. Yogyakarta |
| 71. | Bandar Udara Kediri | Provinsi Jawa Timur |
| 72. | Bandar Udara Komodo - Labuan Bajo | Provinsi Nusa Tenggara Timur |
| 73. | Pengembangan Bandar Udara Internasional Lombok Praya | Provinsi Nusa Tenggara Barat |
| 74. | Pembangunan Bandar Udara Nabire Baru | Provinsi Papua |
| 75. | Pembangunan Bandar Udara Siboru Fak Fak | Provinsi Papua Barat |
| 76. | Pengembangan Bandar Udara Raja Haji Abdullah Tanjung Balai Karimun | Provinsi Kepulauan Riau |
| D. Sektor Kereta | | |
| 77. | Kereta Api Makassar - Parepare (Tahap I dari Pengembangan Jalur Lintas Barat Sulawesi Bagian Selatan) | Provinsi Sulawesi Selatan |
| 78. | Kereta Api Tebing Tinggi - Kuala Tanjung (mendukung KEK Sei Mangkei, bagian dari Jaringan Kereta Api Trans Sumatera) | Provinsi Sumatera Utara |
| 79. | Kereta Api Rantau Prapat - Kota Pinang | Provinsi Sumatera Utara |
| 80. | Kereta Api Akses Bandar Udara Baru Yogyakarta - Kulon Progo | Provinsi D.I. Yogyakarta |

| NO. | DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL | LOKASI |
|--------------------------|--|--|
| 81. | Kereta Api Jakarta - Surabaya | Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi Jawa Timur |
| 82. | <i>Double Track</i> Jawa Selatan | Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi D.I. Yogyakarta, dan Provinsi Jawa Timur |
| 83. | <i>High Speed Railway</i> Jakarta - Bandung | Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat |
| 84. | Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/ <i>Light Rail Transit</i> (LRT) Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi | Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat |
| 85. | Kereta Api Logistik Lahat - Muara Enim - Prabumulih - Tarahan/Lampung dan Prabumulih - Kertapati/Palembang | Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Lampung |
| 86. | Infrastruktur Kereta Api Logistik di Kalimantan Timur | Provinsi Kalimantan Timur |
| 87. | <i>Light Rail Transit</i> (LRT) Provinsi Sumatera Selatan (Metro Palembang) | Provinsi Sumatera Selatan |
| 88. | <i>Light Rail Transit</i> (LRT) Jakarta <i>International Stadium</i> - Kelapa Gading dan Velodrome - Manggarai | Provinsi DKI Jakarta |
| 89. | Jakarta <i>Mass Rapid Transit</i> (MRT) <i>North - South</i> (Bundaran HI - Kota - Ancol Barat) | Provinsi DKI Jakarta |
| 90. | <i>Mass Rapid Transit</i> (MRT) Jakarta <i>East - West Phase I</i> | Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan Provinsi Jawa Barat |
| E. Sektor Kawasan | | |
| 91. | Kawasan Industri Kuala Tanjung | Provinsi Sumatera Utara |
| 92. | Kawasan Industri Landak | Provinsi Kalimantan Barat |
| 93. | Kawasan Industri Ketapang | Provinsi Kalimantan Barat |
| 94. | Kawasan Industri Tanggamus | Provinsi Lampung |
| 95. | Kawasan Industri Jorong | Provinsi Kalimantan Selatan |
| 96. | Kawasan Industri Bantaeng | Provinsi Sulawesi Selatan |
| 97. | Kawasan Industri Morowali | Provinsi Sulawesi Tengah |
| 98. | Kawasan Industri Konawe | Provinsi Sulawesi Tenggara |

| NO. | DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL | LOKASI |
|--|---|----------------------------|
| 99. | Kawasan Industri Teluk Bintuni dan Pengembangan Industri Metanol, Amonia, dan Pemanfaatan Karbon dari hasil CCUS/CCS di Teluk Bintuni | Provinsi Papua Barat |
| 100. | Kawasan Industri Tanah Kuning | Provinsi Kalimantan Utara |
| 101. | Kawasan Industri Wilmar Serang | Provinsi Banten |
| 102. | Kawasan Industri Pulau Obi | Provinsi Maluku Utara |
| 103. | Kawasan Industri Weda Bay | Provinsi Maluku Utara |
| 104. | Kawasan Industri Takalar | Provinsi Sulawesi Selatan |
| 105. | Kawasan Industri Tanjung Enim | Provinsi Sumatera Selatan |
| 106. | Kawasan Terintegrasi Bakauheni | Provinsi Lampung |
| 107. | Kawasan Industri Terpadu Batang | Provinsi Jawa Tengah |
| 108. | Kawasan Industri Indonesia Konawe Industrial Park (IKIP) | Provinsi Sulawesi Tenggara |
| 109. | Kawasan Industri Tanjung Sauh | Provinsi Kepulauan Riau |
| 110. | Kawasan Industri Indonesia Pomalaa Industry Park | Provinsi Sulawesi Tenggara |
| 111. | Kawasan Industri Motui | Provinsi Sulawesi Tenggara |
| 112. | Kawasan Industri Kendari | Provinsi Sulawesi Tenggara |
| 113. | Kawasan Industri Pulau Ladi | Provinsi Kepulauan Riau |
| 114. | Kawasan Industri Pupuk Fakfak | Provinsi Papua Barat |
| F. Sektor Perumahan | | |
| 115. | Pembangunan Rumah Susun | Provinsi DKI Jakarta |
| 116. | Pembangunan Bantuan Rumah Swadaya | Nasional |
| G. Sektor Bendungan dan Irigasi | | |
| 117. | Bendungan Marangkayu | Provinsi Kalimantan Timur |
| 118. | Bendungan Kuningan | Provinsi Jawa Barat |
| 119. | Bendungan Bendo | Provinsi Jawa Timur |
| 120. | Bendungan Gongseng | Provinsi Jawa Timur |
| 121. | Bendungan Tukul | Provinsi Jawa Timur |
| 122. | Bendungan Pidekso | Provinsi Jawa Tengah |
| 123. | Bendungan Tugu | Provinsi Jawa Timur |
| 124. | Bendungan Karalloe | Provinsi Sulawesi Selatan |

| NO. | DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL | LOKASI |
|------|---|------------------------------|
| 125. | Bendungan Keureuto | Provinsi Aceh |
| 126. | Bendungan Tapin | Provinsi Kalimantan Selatan |
| 127. | Bendungan Passeloreng | Provinsi Sulawesi Selatan |
| 128. | Bendungan Lolak | Provinsi Sulawesi Utara |
| 129. | Bendungan Bintang Bano | Provinsi Nusa Tenggara Barat |
| 130. | Bendungan Karian | Provinsi Banten |
| 131. | Bendungan Rukoh dan Bangunan Pengarah Bendungan Rukoh | Provinsi Aceh |
| 132. | Bendungan Way Sekampung | Provinsi Lampung |
| 133. | Bendungan Kuwil Kawangkoan | Provinsi Sulawesi Utara |
| 134. | Bendungan Ladongi | Provinsi Sulawesi Tenggara |
| 135. | Bendungan Ciawi | Provinsi Jawa Barat |
| 136. | Bendungan Sukamahi | Provinsi Jawa Barat |
| 137. | Bendungan Leuwikeris | Provinsi Jawa Barat |
| 138. | Bendungan Cipanas | Provinsi Jawa Barat |
| 139. | Bendungan Tiga Dihaji | Provinsi Sumatera Selatan |
| 140. | Bendungan Semantok | Provinsi Jawa Timur |
| 141. | Bendungan Pamukkulu | Provinsi Sulawesi Selatan |
| 142. | Bendungan Bener | Provinsi Jawa Tengah |
| 143. | Bendungan Sadawarna | Provinsi Jawa Barat |
| 144. | Bendungan Lausimeme | Provinsi Sumatera Utara |
| 145. | Bendungan Sidan | Provinsi Bali |
| 146. | Bendungan Marga Tiga | Provinsi Lampung |
| 147. | Bendungan Bagong | Provinsi Jawa Timur |
| 148. | Bendungan Randugunting | Provinsi Jawa Tengah |
| 149. | Bendungan Mbay | Provinsi Nusa Tenggara Timur |
| 150. | Bendungan Bulango Ulu | Provinsi Gorontalo |
| 151. | Bendungan Napun Gete | Provinsi Nusa Tenggara Timur |
| 152. | Bendungan Temef | Provinsi Nusa Tenggara Timur |
| 153. | Bendungan Way Apu | Provinsi Maluku |

| NO. | DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL | LOKASI |
|--|---|--|
| 154. | Bendungan Meninting | Provinsi Nusa Tenggara Barat |
| 155. | Bendungan Tamblang | Provinsi Bali |
| 156. | Bendungan Beringin Sila | Provinsi Nusa Tenggara Barat |
| 157. | Bendungan Tiu Suntuk | Provinsi Nusa Tenggara Barat |
| 158. | Bendungan Manikin | Provinsi Nusa Tenggara Timur |
| 159. | Bendungan Jlantah | Provinsi Jawa Tengah |
| 160. | Bendungan Jragung | Provinsi Jawa Tengah |
| 161. | Bendungan Sepaku Semoi | Provinsi Kalimantan Timur |
| 162. | Bendungan Budong-Budong | Provinsi Sulawesi Barat |
| 163. | Bendungan Ameroro | Provinsi Sulawesi Tenggara |
| 164. | Bendungan Karangnongko | Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Timur |
| 165. | Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Lhok Guci | Provinsi Aceh |
| 166. | Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Jambo Aye Kanan | Provinsi Aceh |
| 167. | Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Lematang | Provinsi Sumatera Selatan |
| 168. | Pembangunan Bendung dan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Baliase | Provinsi Sulawesi Selatan |
| 169. | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Gumbasa | Provinsi Sulawesi Tengah |
| 170. | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Rentang | Provinsi Jawa Barat |
| 171. | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Glapan | Provinsi Jawa Tengah |
| 172. | Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Lempuing | Provinsi Sumatera Selatan |
| H. Sektor Air Bersih dan Sanitasi | | |
| 173. | Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Semarang Barat | Provinsi Jawa Tengah |
| 174. | Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Jatigede | Provinsi Jawa Barat |
| 175. | Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan | Provinsi Jawa Timur |
| 176. | Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kota Bandar Lampung | Provinsi Lampung |

| NO. | DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL | LOKASI |
|--------------------------|---|---|
| 177. | Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Ir. H. Djuanda/Jatiluhur II | Provinsi Jawa Barat dan Provinsi DKI Jakarta |
| 178. | Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Jatiluhur | Provinsi Jawa Barat dan Provinsi DKI Jakarta |
| 179. | Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Wosusokas | Provinsi Jawa Tengah |
| 180. | Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Karian - Serpong | Provinsi Banten dan Provinsi DKI Jakarta |
| 181. | Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Kamijoro (Bantul, Kulon Progo) | Provinsi D.I. Yogyakarta |
| 182. | Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Benteng - Kobema (Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, dan Seluma) | Provinsi Bengkulu |
| 183. | Sistem Penyediaan Air Baku Bendungan Sidan | Provinsi Bali |
| 184. | Sarana dan Prasarana Air Baku Karian | Provinsi Banten |
| 185. | Jakarta <i>Sewerage System</i> (JSS) | Provinsi DKI Jakarta |
| I. Sektor Tanggul Pantai | | |
| 186. | Tanggul Pantai | Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten |
| J. Sektor Energi | | |
| 187. | Kilang Minyak Tuban (Ekspansi) | Provinsi Jawa Timur |
| 188. | <i>Upgrading</i> Kilang-Kilang Eksisting/ <i>Refinery Development Master Plan</i> (RDMP) | Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Riau, dan Provinsi Sumatera Selatan |
| 189. | <i>Upgrading</i> Kilang Eksisting (RDMP) dan Industri Petrokimia Balongan | Provinsi Jawa Barat |
| 190. | Konstruksi Tangki Penyimpanan BBM | Indonesia Bagian Timur |
| 191. | Konstruksi Tangki Penyimpanan LPG | Indonesia Bagian Timur |
| 192. | Pengembangan Lapangan Abadi Wilayah Kerja Masela | Provinsi Maluku |
| 193. | Pengembangan Lapangan Gendalo, Maha, Gandang, Gehem, dan Bangka (Indonesia <i>Deepwater Development Project/IDD</i>) | Provinsi Kalimantan Timur |
| 194. | Proyek Tangguh LNG <i>Train 3</i> | Provinsi Papua Barat |
| 195. | Pengembangan Lapangan Unitisasi Gas Jambaran - Tiung Biru | Provinsi Jawa Timur |
| 196. | Pembangunan Jaringan Gas Kota | Nasional |

| NO. | DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL | LOKASI |
|----------------------|--|--|
| 197. | Pembangunan Transmisi Pipa Gas (Ruas Cirebon - Semarang dan Ruas KEK Sei Mangkei - Dumai) | Provinsi Jawa Barat - Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Sumatera Utara - Provinsi Riau |
| 198. | Gasifikasi Batu Bara di Tanjung Enim | Provinsi Sumatera Selatan |
| 199. | Pembangunan Fasilitas <i>Coal to Methanol</i> di Kutai Timur | Provinsi Kalimantan Timur |
| 200. | Pembangunan Bahan Bakar Hijau (<i>Green Diesel Bio Refinery Revamping</i> dan Hidrogenasi CPO RU IV Cilacap, <i>Green Refinery</i> RU III Plaju, Katalis Merah Putih Pupuk Kujang Cikampek) | Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Sumatera Selatan, dan Provinsi Jawa Barat |
| 201. | Pengembangan Lapangan Ubadari, CCUS, dan <i>Compresion (UCC Project)</i> di Teluk Bintuni | Provinsi Papua Barat |
| 202. | Pengembangan <i>Biofuel</i> dari Metanol dan Etanol di Kabupaten Bojonegoro | Provinsi Jawa Timur |
| K. Sektor Teknologi | | |
| 203. | Percepatan Pembangunan <i>Technopark</i> | Nasional |
| 204. | Proyek Satelit Multifungsi | Nasional |
| 205. | Pengembangan <i>Drone Male</i> Kombat (Male <i>Unmanned Combat Aerial Vehicle</i>) | Nasional |
| 206. | Pengembangan Teknologi Produksi IVO dan Bensin Sawit dengan Katalis Merah Putih yang Terintegrasi dengan Kebun Rakyat | Nasional |
| 207. | Pengembangan Industri Garam | Nasional |
| 208. | Palapa Ring Integrasi | Nasional |
| L. Sektor Pendidikan | | |
| 209. | Pembangunan Kampus Universitas Islam Internasional Indonesia | Provinsi Jawa Barat |
| M. Sektor Pariwisata | | |
| 210. | Proyek Pariwisata Seribu Pulau di Kepulauan Seribu | Provinsi DKI Jakarta |
| N. Sektor Perkebunan | | |
| 211. | Pembangunan Kelapa Dalam dan Industri Turunannya | Provinsi Papua Barat |

II. PROGRAM

| NO. | DAFTAR PROGRAM STRATEGIS NASIONAL | KETERANGAN PROGRAM STRATEGIS NASIONAL |
|-----|---|---|
| 1. | Program Ketenagalistrikan | <p>Program Ketenagalistrikan terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (PIK) (daftar proyek diatur dalam Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan); b. Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap Nasional; c. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Skala Besar di Kepulauan Riau; dan d. Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air Sungai Mentarang di Kalimantan Utara. |
| 2. | Program Pemerataan Ekonomi | Percepatan Penyelesaian Pengukuhan Kawasan Hutan, Perhutanan Sosial, Reforma Agraria, Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, dan Peremajaan Kebun Rakyat. |
| 3. | Program Pengembangan Kawasan Perbatasan | 10 Pos Lintas Batas Negara (PLBN), Jalan Perbatasan Provinsi Kalimantan Timur, Jalan Paralel Perbatasan Provinsi Kalimantan Utara dan Jalan Akses Perbatasan Kalimantan Utara. |
| 4. | Program Pengembangan Jalan Akses <i>Exit Toll</i> | 58 lokasi Exit tol pada 10 Provinsi. |
| 5. | Program Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional | Fokus lokasi di DPSP Danau Toba, DPSP Borobudur, DPSP Mandalika, DPSP Labuan Bajo, dan DPSP Likupang. |
| 6. | Program Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) | Daftar proyek diatur dalam Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan. |
| 7. | Program Pembangunan <i>Smelter</i> | <p>Program Pembangunan <i>Smelter</i> terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pembangunan 8 (delapan) Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Komoditas Nikel oleh: <ul style="list-style-type: none"> 1) PT Artabumi Sentra Industri di Morowali, Sulawesi Tengah; 2) PT Wanxiang Nickel Indonesia di Morowali, Sulawesi Tengah; 3) PT Artha Mining Industry di Bombana, Sulawesi Tenggara; |

| NO. | DAFTAR PROGRAM STRATEGIS NASIONAL | KETERANGAN PROGRAM STRATEGIS NASIONAL |
|-----|-----------------------------------|---|
| | | <p>4) PT Ceria Nugraha Indotama di Kolaka, Sulawesi Tenggara;</p> <p>5) PT Macika Mineral Industri di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara;</p> <p>6) PT Virtue Dragon Nickel Industry di Konawe, Sulawesi Tenggara;</p> <p>7) PT Aneka Tambang P3FH di Halmahera Timur, Maluku Utara; dan</p> <p>8) PT Aneka Tambang Niterra Haltim di Halmahera Timur, Maluku Utara.</p> <p>b. Pembangunan 2 (dua) Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Komoditas Bauksit oleh:</p> <p>1) PT Dinamika Sejahtera Mandiri di Sanggau, Kalimantan Barat; dan</p> <p>2) PT Well Harvest Winning Alumina Refinery (ekspansi) di Ketapang, Kalimantan Barat.</p> <p>c. Pembangunan 2 (dua) Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Komoditas Tembaga oleh:</p> <p>1) PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur; dan</p> <p>2) PT Amman Mineral Industri di Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat.</p> <p>d. Pembangunan 1 (satu) Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Komoditas Pasir Besi dan Vanadium oleh PT Alchemist Metal Industry di Halmahera Utara, Maluku Utara.</p> <p>e. Pembangunan Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Komoditas Nikel Terintegrasi dengan Penambangan:</p> <p>1) Smelter PT Bahodopi Nickel Smelting Indonesia dan Tambang PT Vale Indonesia Blok Bahodopi di Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah; dan</p> <p>2) Smelter PT Kolaka Nikel Indonesia dan Tambang PT Vale Indonesia Blok Pomala di Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara.</p> |

| NO. | DAFTAR PROGRAM STRATEGIS NASIONAL | KETERANGAN PROGRAM STRATEGIS NASIONAL |
|-----|---|--|
| | | f. Pembangunan Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Komoditas Nikel Terintegrasi dengan Penambangan serta Kawasan Industri dalam rangka Pengembangan EV Battery Nasional PT Aneka Tambang Group, PT Industri Baterai Indonesia, serta mitranya di Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara. |
| 8. | Program Peningkatan Penyediaan Pangan Nasional/ <i>Food Estate</i> | Daftar proyek diatur dalam Peraturan Presiden tentang Program Peningkatan Penyediaan Pangan Nasional Melalui Pengembangan Kawasan <i>Food Estate</i> . |
| 9. | Program Pengembangan <i>Superhub</i> | Bali - Nusa Tenggara, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara dan Integrasi PT Pelindo I, PT Pelindo II, PT Pelindo III, dan PT Pelindo IV ke dalam PT Pelindo II. |
| 10. | Program Percepatan Pengembangan Wilayah yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan dan Peraturan mengenai Ibu Kota Negara | <p>Program terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Percepatan Pembangunan Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Negara dan Infrastruktur Pendukung Ibu Kota Negara yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara beserta perubahannya; b. Percepatan Pengembangan Wilayah yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal - Pemalang; c. Percepatan Pengembangan Wilayah yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan; d. Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan; dan |

| NO. | DAFTAR PROGRAM STRATEGIS NASIONAL | KETERANGAN PROGRAM STRATEGIS NASIONAL |
|-----|--|---|
| | | e. Percepatan Pengembangan Wilayah Lainnya yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. |
| 11. | Program Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus | Kawasan Ekonomi Khusus yang ditetapkan oleh Presiden. |
| 12. | Program Revitalisasi Industri Gula Nasional dan Hilirisasi Industri Kelapa Sawit | Integrasi Grup PT Perkebunan Nusantara melalui pembentukan SugarCo, PalmCo, dan SupportingCo. |
| 13. | Program Pengembangan Kawasan <i>Eco-City</i> | Pengembangan Kawasan Rempang <i>Eco-City</i> di Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan <i>masterplan</i> . |

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

I Ketut Hadi Priatna
NIP 197405071999031002